

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi umumnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Investasi dapat berperan sebagai penyokong utama dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada peningkatan produksi dan sumber pada penambahan investasi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi cermin pembangunan ekonomi suatu wilayah, dengan begitu pembentukan modal (investasi) yang besar perlu dilakukan oleh negara berkembang agar dapat terlepas dari keterbelakangan dan kemiskinan. Melalui investasi yang semakin meningkat pertumbuhan ekonomi akan dapat dipercepat dan kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan (Sukirno, 2010).

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi dapat menambah nilai tambah ekonomi dan maupun nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah tersebut antara lain berupa dihasilkannya barang dan jasa, kesempatan kerja, pemanfaatan aset produksi, *surplus* usaha ataupun nilai tambah sosial adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu makin tinggi aktivitas ekonomi suatu daerah, maka makin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah itu dan sebaliknya. Setiap aktivitas ekonomi diawali dengan aktivitas investasi. Dengan demikian pemerintah harus proaktif untuk memanfaatkan setiap

peluang investasi menjadi kenyataan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Henry, 2009).

Di negara berkembang masalah yang sering timbul adalah kurangnya persediaan modal untuk mendukung proses produksi. Terbatasnya alat-alat modal dalam perekonomian dapat dilihat dari jumlah alat modern yang digunakan dalam proses produksi. Hal itu berdampak pada produktivitas dalam organisasi produksi yang sangat tidak efisien dan selanjutnya mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di negara berkembang. Masalah kekurangan pembentukan modal disebabkan ketidakmampuan dana modal dan tabungan masyarakat untuk investasi. Itu semua mendorong adanya pembentukan modal yang berasal dari negara asing yang mampu menyediakan modal besar.

Investasi menurut dananya dapat berupa investasi asing dan investasi dalam negeri. Investasi asing dapat disebut penanaman modal asing (PMA) (Karl E, Case dan Ray C, 2007). Investasi dapat berperan penting pada pengembangan wilayah sekaligus penentu peningkatan *output* yang mampu dihasilkan dalam suatu wilayah. Ini dikarenakan investasi menjadi akumulasi modal yang dapat digunakan untuk membuat pabrik baru, pengadaan mesin baru dan pembangunan fisik di daerah. Penambahan akumulasi modal yang langsung bergerak di sektor riil akan mendorong tingkat produktivitas. Sektor riil akan berjalan baik dengan adanya penambahan modal yang didapat dari proses investasi (Henry, 2009).

Secara aspek makro, investasi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai tambah yang merupakan sumber utama kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari 5 komponen nilai tambah akibat adanya investasi yaitu: balas jasa modal yang

diterima oleh masyarakat pemilik modal, upah dan gaji yang di terima masyarakat pekerja, sewa sarana produksi yang diterima oleh masyarakat pemilik faktor produksi, *surplus* usaha yang diterima oleh masyarakat pengusaha, dan akhirnya investasi merupakan fungsi dari kesejahteraan masyarakat (Henry, 2009)

Kegiatan investasi berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor, serta kegiatan ekonomi masyarakat secara umumnya. Dampak ganda investasi sebelum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dirasakan ikut berpengaruh dengan faktor-faktor ekonomi lainnya. Investasi berhubungan langsung dan sangat erat dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rachbini, 2010). Selain itu, jika membicarakan investasi dalam sistem produksi, maka erat kaitannya dengan faktor input. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa dengan adanya penambahan modal menjadi salah satu hal yang mendorong produktivitas. Adanya penambahan modal menjadikan salah satu faktor produksi dapat mendorong kualitas dan kuantitas faktor lain yang digunakan bersama faktor tersebut untuk dapat meningkatkan produktivitas.

Terdapat beberapa motivasi FDI masuk ke dalam suatu negara atau daerah, terdapat 3 (tiga) alasan untuk melakukan investasi antara lain *market-seeking*, *resource-seeking* dan *efficiency-seeking* (UNCTAD, 1998). Motivasi *market-seeking* FDI bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar dan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Motivasi *resource-asset* dari FDI berdasarkan alasan harga bahan baku, menurunkan biaya tenaga kerja, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik (pelabuhan,

jalan, dan telekomunikasi), dan teknologi. Sedangkan *efficiency-seeking* FDI karena dimotivasi untuk menciptakan sumber daya saing yang baru bagi perusahaan serta karena biaya-biaya produksi yang lebih rendah termasuk juga pertimbangan produktivitas.

Beberapa faktor tersebut menjadi daya tarik investasi bagi suatu daerah. Setiap daerah berusaha untuk menarik para investor untuk dapat menanamkan modalnya di daerah mereka. Hal ini membuat pemerintah daerah menjadikan daerahnya menjadi potensial untuk kegiatan investasi. Menurut (Henry, 2009) di era otonomi dan globalisasi ekonomi yang berjalan serempak saat ini, pemerintah daerah atau kabupaten dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Era otonomi daerah telah merubah model pembangunan yang dulunya bersifat sentralistis (*top down*), menjadi desentralisasi atau otonomi (*bottom up*).

Dengan adanya proses otonomi daerah, pemerintah daerah mampu membangun daerahnya secara mandiri. Begitu pun yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Provinsi Jawa barat memiliki potensi ekonomi yang mendukung seperti di kabupaten Bekasi, Cirebon, Karawang dan Bogor. Empat kabupaten ini merupakan tujuan investasi asing terbesar di Jawa Barat. Sektor yang menjadi tujuan investasi asing di Jawa Barat yaitu, industri makanan, industri kertas dan percetakan, perumahan kawasan industri dan perkantoran, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya, listrik gas dan air dan kehutanan. Hal ini menjadi pendorong wilayah ini menjadi sebagai pusat kegiatan industri barang dan jasa di Indonesia.

Roda perekonomian di Jawa Barat menjadi pendorong tumbuhnya penanaman modal asing (FDI). Wilayah Jawa Barat masih menjadi tempat yang paling banyak menyerap penanaman modal asing. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai realisasi investasi penanaman modal asing Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2017:



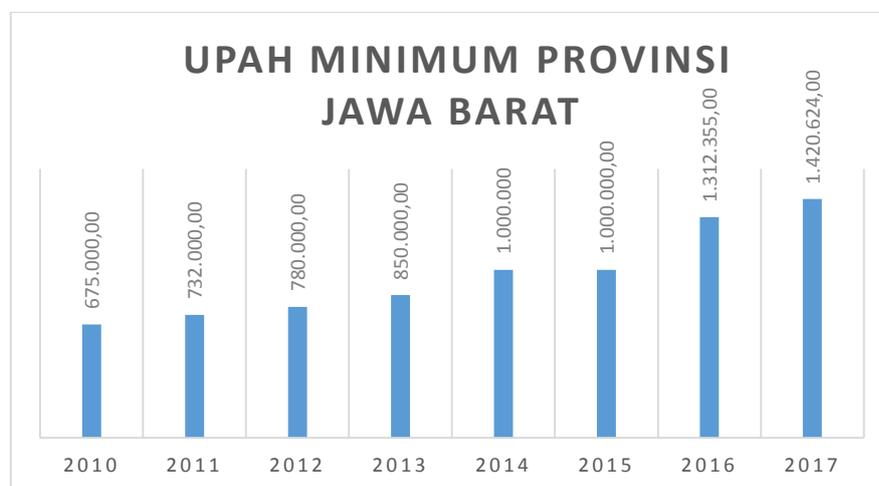
Gambar 1.1 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing provinsi Jawa Barat (juta US\$) tahun 2010–2017

Sumber : Badan Pusat Statistik (data di olah)

Berdasarkan gambar di atas, wilayah Jawa Barat tahun 2010-2017 memiliki penanaman modal asing cenderung menurun, tahun 2010-2013 mengalami kenaikan investasi sedangkan tahun 2013-2017 mengalami penurunan bisa terlihat dari gambar di atas. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor asing untuk melakukan FDI yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kemudahan perizinan (Yolanda, 2011). SDM atau tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan membutuhkan upah. Upah di Indonesia dapat diatur melalui Upah Minimum

Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh gubernur setiap provinsi yang berlaku selama 1 (satu) tahun berdasarkan standar Kehidupan Hidup Layak (KHL).

Tiap tahun upah minimum provinsi selalu meningkat. Contohnya provinsi Jawa Barat daerah yang memiliki sektor industri yang besar, kenaikan upah minimum provinsi tahun 2019 berkisar antara 8,25%. Jawa Barat tahun 2017 naik sebesar 8,25% menjadi sebesar Rp 1.420.624 dari 34 provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 31 UMP terendah diseluruh provinsi se Indonesia. Jika dibandingkan daerah lain di pulau Jawa, Jawa Barat merupakan UMP terkecil dibandingkan 2 daerah yaitu, DKI Jakarta sebesar Rp.3.355.750 dan Banten sebesar Rp.1.931.180. Padahal dari ke dua daerah tersebut kenaikan upah minimum provinsinya sama dengan Jawa Barat sebesar 8,25%. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2, perkembangan upah minimum (UMP) di provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.2 Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2010-2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (Data di olah)

Jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir kondisi upah minimum provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2010-2017. Selama proses perkembangannya, upah minimum selalu meningkat pada tahun

selanjutnya, hal tersebut disebabkan karena penetapan upah minimum mengacu pada adanya inflasi dan biaya hidup standar atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terus meningkat setiap tahunnya (Devanto, 2011).

Di sisi lain kenaikan UMR akan membawa kesejahteraan bagi para tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. UMR dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. UMR dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Nurtiyas, 2016).

Kenaikan UMP yang meningkat harus diikuti dengan peningkatan produktivitas dari tenaga kerja. Makin besarnya UMP tingkat penawaran kerja akan meningkat dan menyebabkan meningkatnya daya saing antara tenaga kerja. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Sarman Simanjorang (2018) meningkatnya UMP akan membuat meningkatnya daya saing antara tenaga kerja sehingga harus dibarengi dengan meningkatnya produktivitas dan keterampilan para tenaga kerja (liputan6, 2019). Sama seperti pendapat (Sumarsono, 2009) dalam *efficiency wage theory* bahwa penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (Badan Pusat statistik, 2017), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja terdiri atas 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berikut ini perkembangan kondisi tenaga kerja di Jawa Barat 2014-2017:



Gambar 1.3 Kondisi Tenaga kerja Jawa Barat tahun 2014-2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (data di olah)

Bisa dilihat jumlah tenaga kerja dari tahun 2014-2017 meningkat sedangkan jumlah angkatan kerja tahun 2014-2015 menurun tapi tahun 2015-2017 cenderung meningkat stabil dan bukan angkatan kerja dari tahun 2014-2016 maningkat sedangkan tahun 2016-2017 cenderung turun. Menurut Badan Pusat Statistik angkatan kerja dibagi menjadi 2 kelompok yaitu, bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Sedangkan pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya. Berikut ini gambar kondisi angkatan kerja di Jawa Barat tahun 2014-2017:



Gambar 1.4 Kondisi angkatan kerja Jawa Barat Tahun 2014-2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (Data diolah)

Berdasarkan gambar di atas terlihat kondisi angkatan kerja di Jawa Barat cenderung naik, baik itu angkatan kerja dan bekerja sedangkan pengangguran naik tahun 2014-2016 dan turun pada tahun 2016-2017. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja seharusnya membuat jumlah penanaman modal naik, karena investor asing akan lebih berminat untuk melakukan investasi asing jika memiliki persepsi tersedianya tenaga kerja yang berlimpah untuk melakukan investasinya (Sitinjak, 2011). Namun kenyataannya disaat tenaga kerja dan angkatan kerja meningkat jumlah penanaman modal asing cenderung turun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti adalah tidak menentunya investasi yang terjadi di provinsi Jawa Barat. Tidak menentunya investasi kemungkinan di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang akan diteliti antara lain upah minimum provinsi, dan tenaga kerja. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian

tentang pengaruh upah minimum provinsi dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di provinsi Jawa Barat tahun 1988-2017.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara upah minimum provinsi terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh antara tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh antara upah minimum provinsi dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengetahui pengaruh antara upah minimum provinsi terhadap penanaman modal asing (FDI) di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui pengaruh antara tenaga kerja terhadap penanaman modal asing (FDI) di Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui pengaruh antara upah minimum provinsi dan tenaga kerja terhadap penanaman modal asing (FDI) di Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna sebagai penambahan informasi dan kajian yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara upah minimum provinsi, tenaga kerja dan FDI. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan kajian para akademika dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

1). Bagi pembaca

Mendapatkan pengetahuan tentang penanaman modal asing dan yang mempengaruhinya.

2). Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan kebijakan yang diambil berkaitan dengan UMP, tenaga kerja dan FDI.

3). Bagi mahasiswa

Nantinya dapat menjadi pengusaha, diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang memadai mengenai salah satu faktor penanaman modal asing.